

Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Asdi^{a1}, Munari^{a2}

^aUPN "Veteran" Jawa Timur, Indonesia.

¹*alvinmanang22@gmail.com**

**korespondensi penulis*

Received: 26 Agustus 2023; Revised: 20 September 2023; Accepted: 25 September 2023

*

Abstrak

Tujuan penelitian ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat atau tidaknya pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Pengawasan Keuangan Daerah, terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Surabaya. Objek dalam penelitian ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya. Sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik Non-Probability Sampling dengan menggunakan purposive sampling. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada responden untuk dijawab dengan menggunakan skala likert, kuesioner yang disebarkan sebanyak 35 kuesioner dan kembali sebanyak 35 kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan yaitu uji kualitas data, uji normalitas, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis dengan menggunakan analisis regresi linear berganda (Multiple Regression Analysis). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota Surabaya dan pengawasan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota Surabaya.

Kata kunci: *SAP, Penerapan SAP, Pengawasan Keuangan Daerah, Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota.*

Abstract

The purpose of this study was to determine whether the application of the State Accounting Standards (SAP) and the Regional Financial Regulator has an impact on the quality of the financial reports of the Surabaya City Government. The subject of this study is the Surabaya City Regional Finance and Asset Management Agency. The sample in this study was determined using the non-probability sampling technique using targeted sampling. The type of data used in this research is primary data. Data collection was performed by distributing questionnaires to respondents for response using a Likert scale. 35 questionnaires were distributed and 35 questionnaires returned. The data analysis technique used is data quality test, normality test, classical acceptance test and hypothesis test using multiple linear regression analysis. The results of this study show that the application of government accounting standards affects the quality of Surabaya Municipality's financial reports and that regional financial supervision does not affect the quality of Surabaya financial reports.

Keywords *Implementation of Government Accounting Standards, Regional Financial Supervision, Quality of City Government Financial Reports.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari banyak daerah, baik itu daerah yang bersifat otonom maupun daerah yang bersifat administrasi. Pesatnya perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia membuat pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah tersebut. Pelaksanaan otonomi daerah dapat diartikan bahwa pengelolaan keuangan sepenuhnya ada ditangan pemerintah daerah. Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah dan sumbangan yang besar dalam upaya mewujudkan akuntabilitas.

Pengelolaan keuangan daerah yang *accountable* diharapkan dapat mengelola dana secara transparan, efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut seiring dengan tuntutan kepada lembaga pemerintah untuk meningkatkan kualitas dalam menjalankan aktivitas pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Salah satu bentuk kongkrit untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan bertanggungjawab yaitu dengan membuat laporan keuangan pemerintah. Laporan keuangan yang akuntabel adalah laporan yang telah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah yang baik.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dijelaskan pada Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menyebutkan Standar Akuntansi Pemerintah adalah “prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah”.

Dengan adanya perundang-undangan dan peraturan yang memadai dalam mengatur pengelolaan keuangan negara, masih perlu diperhatikan pelaksanaan pengelolaan keuangan negara masih rentan pada praktek penyalahgunaan dan penyimpangan. Sehingga dalam mencegah hal tersebut diperlukannya pengawasan keuangan daerah yang ketat.

Pengawasan keuangan daerah berperan penting sebagai peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah, pengawasan diperlukan untuk memastikan selama pengelolaan anggaran daerah berjalan dengan baik dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga menghasilkan kinerja keuangan yang baik. Pengawasan Keuangan Daerah diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010 tentang pengelolaan pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2011. Fenomena yang terjadi pada pemerintahan Kota Surabaya yaitu Pemerintah Kota Surabaya berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian selama 9 tahun berturut-turut. Namun, dibalik opini yang diberikan oleh BPK terdapat beberapa temuan dalam 5 (lima) tahun terakhir yaitu pada tahun 2017 berupa kesalahan pencatatan dan pelaporan persediaan unit perbekalan farmasi di Surabaya yang belum sesuai dengan kebijakan akuntansi. Selanjutnya pada tahun 2018, ditemukan permasalahan terkait pengakuan piutang retribusi dibeberapa Dinas tidak konsisten. Lalu pada tahun 2019, BPK menemukan permasalahan mengenai penganggaran pada lima Perangkat Daerah dimana mengakibatkan Belanja Modal di Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019 disajikan lebih rendah (*understated*) dan Belanja Barang Jasa disajikan lebih tinggi (*overstated*). Pada tahun 2020 BPK juga menemukan permasalahan mengenai perlakuan akuntansi terkait koreksi kesalahan mendasar Laporan Perubahan Ekuitas yang belum sepenuhnya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Terakhir pada tahun 2021 terdapat dua permasalahan yaitu penganggaran dan realisasi kegiatan Swakelola Permakanan tidak sesuai dengan ketentuan dan Penatausahaan Belanja Jasa Kantor-Honor Narasumber tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan.

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, penelitian ini membahas 2 rumusan masalah yaitu, Apakah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya dan Apakah Pengawasan Keuangan Daerah mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Daerah Kota Surabaya.

Berdasarkan Rumusahan Masalah yang telah ditentukan, penelitian ini dilakukan karena memiliki tujuan yaitu, Mengetahui pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Pemerintah Kota Surabaya dan Mengetahui pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya.

Manfaat dari penelitian ini untuk teoritis adalah diharapkan penelitian ini dapat menjadi dasar teoritis dan menjadi bahan referensi yang dapat bermfaat bagi penelitian selanjutnya. Manfaat untuk penelitian ini bagi pemerintahan yaitu dapat menjadi masukan dan tambahan pengetahuan tentang pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah diharapkan dapat diterapkan dengan baik dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah.

TINJAUAN PUSTAKA

Standar Akuntansi Pemerintah

Standar Akuntansi Pemerintah merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam penyusunan dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. SAP berguna untuk penyusunan laporan keuangan dalam menentukan informasi yang harus disajikan kepada pihak diluar instansi. Kegunaan lain dari SAP yaitu meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Pengertian dari Standar Akuntansi Pemerintah berdasarkan PP No. 17 Tahun 2010 yaitu "Standar Akuntansi Pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. Prinsi-prinsip yang dimaksud yaitu basis akuntansi, nilai historis, realisasi, substansi mengungguli bentuk formal, perioditas, konsistensi, pengungkapan lengkap,dan penyajian wajar".

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah mewajibkan seluruh entitas pelaporan, yang dalam hal ini termasuk pemerintah daerah untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparasi, keseimbangan antara generasi dan evaluasi kinerja. Standar Akuntansi Pemerintah terdiri dari sebelas Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) yang menjadi landasan pedoman bagi pemerintah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP,terdapat sebelas PSAP yaitu ; 1) PSAP No.1 Penyajian Laporan Keuangan, 2) PSAP No.2 Laporan Realisasi Anggaran, 3) PSAP No. 3 Laporan Arus Kas, 4) PSAP No. 4 Catatan atas Laporan Keuangan, 5) PSAP No. 5 Akuntansi Persediaan, 6) PSAP No. 6 Akuntansi Investasi, 7) PSAP No. 7 Akuntansi Aset Tetap, 8) PSAP No 8 Akuntansi Konstuksi dalam Pengerjaan, 9) PSAP No. 9 Akuntansi Kewajiban, 10) PSAP No. 10 Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa, 11) PSAP No. 11 Laporan Keuangan Konsolidasian.

Pengawasan Keuangan Daerah

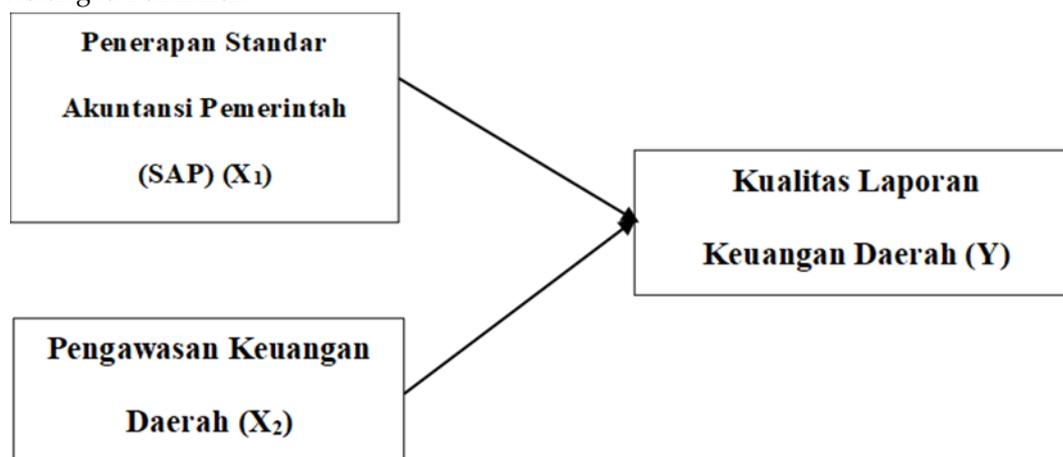
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010, pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditunjukkan untuk menjamin agar pemerintah daerah

secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan diperlukan untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan dari rencana yang telah ditetapkan. Parameter penilaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kinerja menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 2009 Perubahan atas Pemendagri No. 23 Tahun 2007 Tentang Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yang termasuk dalam ruang lingkup pengawasan pengelolaan keuangan daerah yaitu Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah, Pertanggungjawaban Pendapatan, dan Belanja Daerah.

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan laporan yang menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Kualitas laporan keuangan memiliki karakteristik yang menjadi ukuran normatif dan menjadi prasyarat untuk menentukan kualitas laporan keuangan. Karakteristik laporan keuangan tersebut yaitu; a) relevan, b) andal, c) dapat dibandingkan, dan d) dapat dipahami.

Kerangka Pemikiran



Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, penelitian ini memiliki hipotesis diantaranya. H1 : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dan H2: Pengawasan Keuangan Daerah Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

METODE (Level 1)

Dalam penelitian ini menggunakan analisis berupa regresi linear berganda. Populasi dan sampel yang peneliti gunakan yaitu Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan, Sub Bidang Keuangan, dan Bidang Penganggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya dengan total populasi 76 orang, teknik penentuan sample pada penelitian ini menggunakan purposive sampling yaitu penentuan sampel berdasarkan kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh peneliti untuk

nantinya mengisi kuesioner yang nantinya akan diberikan. Pada penelitian ini diperoleh 30 sampel yang seluruh sampel telah memenuhi kriteria-kriteria yang ada.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang didapatkan dari hasil penyebaran kuesioner secara langsung oleh responden. Kuesioner dalam penelitian ini menggunakan skala likert. Setiap pernyataan disediakan 5 (lima) alternatif jawaban yang memiliki skor 1-5, yaitu Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Netral (N), Tidak Setuju (TS), Sangat Tidak Setuju (STS).

Uji Analisis data yaitu uji hipotesis yang meliputi 1). Analisis Regresi Linier Berganda, pengujian digunakan karena variabel yang digunakan penelitian lebih dari dua variabel. 2). Uji Simultan F, dilakukan untuk mengetahui apakah kedua variabel independen (bebas) secara bersamaan berpengaruh terhadap variabel dependen (terikat). 3). Uji Parsial t untuk mengetahui hubungan signifikansi antara variabel independen dengan variabel dependen.

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yang diteliti, yaitu variabel independen (X) yaitu Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X1) dan Pengawasan Keuangan Daerah (X2) dan Variabel (Y) yaitu Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

PEMBAHASAN (Level 1)

Tabel 1. 1 Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-0,290	0,521		-0,557	0,582
	X1	0,041	0,004	0,877	10,201	0,000
	X2	0,002	0,003	0,050	0,585	0,563

Pengujian selanjutnya uji hipotesis. Pada uji regresi linier berganda ditunjukkan pada tabel berikut:

Dari tabel diatas menunjukkan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 0,072 + 0,040 X1 - 0,039 X2 + e$$

Dari persamaan regresi tersebut, dapat disimpulkan bahwa:

1. Nilai konstanta sebesar 0,072 yang mengartikan bahwa apabila semua variabel independen (X) memiliki nilai konstanta maka variabel dependen (Y) memiliki nilai positif 0,072
2. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X₁) menghasilkan nilai koefisien sebesar 0,40. Nilai tersebut menjelaskan bahwa tiap terdapat kenaikan 1% dari Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah akan meningkatkan nilai kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah senilai 0,40. Sehingga Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X₁) berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y).

3. Pengawasan Keuangan Daerah (X_2) menghasilkan nilai koefisien sebesar $-0,039$. Hasil ini menjelaskan bahwa setiap kenaikan 1% untuk tiap pengawasan keuangan daerah maka akan menurunkan nilai kualitas laporan keuangan sebesar $0,039$. Sehingga Pengawasan Keuangan Daerah tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Uji Hipotesis

Uji Simultan F merupakan pengujian yang digunakan untuk mencari apakah hasil seluruh variabel penelitian Ketika diuji secara bersamaan akan menghasilkan nilai simultan atau tidak (Santoso 2016). Dalam mengetahui lolos tidaknya suatu dalam uji F dapat dilihat dari nilai signifikansi $< 0,05$.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai signifikansi sebesar $0,000$. Hal ini
Tabel 1. 1 Hasil Uji Analisa Regresi Linier Berganda

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	18,357	2	9,179	52,054	.000 ^b
	Residual	5,643	32	0,176		
	Total	24,000	34			

menjelaskan bahwa nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ sehingga penerapan standar akuntansi pemerintah dan pengawasan keuangan daerah ketika diuji secara bersamaan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Uji Partial t

Tabel 1. 2 Hasil Uji Parsial (t)

Model	T	Sig.
1 (Constant)	1,335	,191
X1	10,125	,000
X2	-1,338	,190

a. Dependent Variable: Y

Uji partial t seringkali digunakan untuk mengetahui pengaruh tiap-tiap variabel independen terhadap variabel dependen penelitian (Ghozali, 2018). Suatu variabel dikatakan berpengaruh atau hipotesis diterima apabila memiliki nilai signifikansi $< 0,05$. Begitupun sebaliknya, jika nilai signifikan $> 0,05$ lebih besar maka variabel tidak berpengaruh atau hipotesis ditolak.

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan tiap-tiap hasil uji parsial dari variabel penelitian antara lain.

H₁ : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Menurut hasil yang dimiliki menunjukkan nilai signifikan (sig) sebesar 0,000 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 maka penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan hipotesis diterima.

H₂ : Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Menurut hasil yang dimiliki menunjukkan nilai signifikansi (sig) sebesar 0,191 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 maka pengawasan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan hipotesis ditolak.

Koefisien Determinansi (R²)

Tabel 1. 3 Hasil Uji Koefisien Determinansi (R²)

Model Summary^b			
Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	,880 ^a	,775	,761

a. Predictors: (Constant), X2, X1
b. Dependent Variable: Y

R *Square* atau koefisien determinansi seringkali digunakan untuk menguji besar presentase variabel-variabel independen penelitian dalam mendeskripsikan variabel dependennya (Ghozali, 2018). Apabila nilai R *square* yang dimiliki semakin besar, maka semakin tinggi pula variabel independen dapat menjelaskan dependennya. Nilai tersebut dapat dilihat dari tabel 1.4 uji koefisien determinansi dimana menghasilkan R *square* senilai 0,775 atau 77,5%. Ini menjelaskan jika penerapan standar akuntansi pemerintah dan pengawasan keuangan daerah dapat menjelaskan 77,5% kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Hipotesis pertama yang diajukan adalah penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif kualitas laporan keuangan daerah. Berdasarkan hasil penelitian yang telah disebutkan sebelumnya, diperoleh hasil bahwa variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

(PSAP) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000. $0,000 < 0,05$, artinya PSAP berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Disamping itu, nilai koefisien pada hasil analisis regresi menunjukkan angka 0,040. Hal tersebut menjelaskan jika PSAP memiliki hubungan positif dengan kualitas laporan keuangan daerah. Berdasarkan hasil – hasil tersebut maka dapat disimpulkan jika H1 pada penelitian ini diterima. Hasil menyimpulkan jika Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah Surabaya.

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian lain milik (Hayadi, N., & Rosini 2020) dan milik (Ikriyati, & Aprila, 2019). Kedua penelitian tersebut menjelaskan jika Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. (Ikriyati, & Aprila, 2019) menjelaskan dalam penelitiannya jika kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Seluma memiliki dampak positif terhadap penerapan SAP. Hal ini menjelaskan jika semakin tinggi penerapan SAP yang dilakukan maka semakin baik kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Ini dikarenakan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah yang telah sesuai dengan prinsip atau kaidah akuntansi yang baik. Sehingga, apabila standar tersebut telah diterapkan dengan baik dalam proses penyajian laporan keuangan pemerintah, jelas akan meningkatkan kualitas dari laporan keuangan itu sendiri. Selain itu, dengan diterapkannya standar akuntansi pemerintah tersebut, laporan keuangan yang disajikan akan lebih jelas dan mudah dipahami, baik itu oleh pihak pemerintahan serta masyarakat yang ada. Karena tujuan dari penyajian laporan keuangan daerah itu sendiri agar mudah dipahami sehingga perlu diterapkannya struktur penyajian laporan yang baik dan benar.

Adanya penerapan standar akuntansi pemerintah juga dapat menjadikan laporan keuangan yang disajikan menjadi lebih transparan, akurat, reliabel dan jelas. Oleh karena itu, semakin tinggi penerapan SAP semakin baik kualitas laporan keuangan daerah yang dihasilkan.

Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Hipotesis kedua dalam penelitian ini yaitu pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan SPSS versi 25, diketahui hasil uji parsial yang dimiliki menunjukkan angka signifikansi sebesar 0,190. $0,190 > 0,05$ yang artinya pengawasan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Sehingga H2 dalam penelitian ini ditolak, dimana baik tidaknya pengawasan keuangan daerah yang dijalankan tidak mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah yang dihasilkan.

Pengawasan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah sejalan dengan penelitian milik (Purboraras 2018). Dijelaskan dalam penelitiannya jika kualitas laporan keuangan daerah di Kabupaten Blitar tidak dapat dipengaruhi oleh pengawasan keuangan daerah. Hal tersebut menjelaskan jika pengawasan keuangan daerah yang dijalankan belum efisien dan efektif sehingga kualitas laporan yang dihasilkan tidak berakibat apapun. Selain itu, adanya evaluasi belum dilakukan secara rutin serta pencatatan yang dilakukan sebagian belum dilakukan dengan baik sesuai indikator penilaian yang dimiliki dalam penelitian ini. Dengan demikian hal tersebut jelas

mengakibatkan kualitas laporan keuangan daerah yang dihasilkan oleh pemerintah daerah Surabaya tidak lebih baik maupun lebih buruk atas adanya pengawasan keuangan daerah.

KESIMPULAN

Merujuk pada rumusan masalah serta hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan dalam penelitian ini antara lain:

1. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini dibuktikan dengan hasil nilai uji hipotesis sebesar $0,000 < 0,05$ dan koefisien regresi senilai 0,040.
2. Pengawasan Keuangan Daerah tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil ini dibuktikan dengan hasil nilai uji hipotesis sebesar $0,190 > 0,05$ dan koefisien regresi $-0,39$.

SARAN

Berdasarkan beberapa kesimpulan sebelumnya, maka peneliti dapat memberikan beberapa saran dalam penelitian, antara lain:

1. Bagi peneliti berikutnya, diharapkan untuk mempertimbangkan kembali variabel – variabel penelitian yang digunakan. Hal ini merujuk pada hasil penelitian dimana salah satu variabel menunjukkan hasil tidak signifikan, sehingga diharapkan dapat memilih variabel yang lebih bervariasi dan berpengaruh. Selain itu, uji R square menunjukkan nilai 77,5% sehingga 22,5% dari kualitas laporan keuangan pemerintah dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian.
2. Bagi instansi pemerintah, terkhusus pada bagian – bagian akuntansi, keuangan, dan pengadaan diharapkan mampu menerapkan standar akuntansi yang telah ditetapkan. Hal ini dimaksudkan agar output dari laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah dapat dengan benar pertanggungjawabannya, Disamping itu, pemerintah juga harus dengan tegas untuk mengawasi proses atau jalannya pembuatan laporan keuangan mulai dari awal transaksi serta pencatatannya. Agar tidak terjadi kecurangan serta agar kualitas laporan keuangan yang dihasilkan maksimal.

KETERBATASAN DAN IMPLIKASI PENELITIAN

Penelitian ini memiliki keterbatasan hasil dari tiap – tiap responden. Dimana karena menggunakan data primer, maka jawaban dari kuisioner bergantung pada asumsi dan persepsi tiap pegawai. Hal ini tentu saja dapat menimbulkan perbedaan dengan realita yang sesungguhnya telah terjadi dalam pemerintahan.

Untuk implikasi dari adanya penelitian ini yaitu kewajiban bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas laporan keuangannya agar lebih reliabel, akurat, transparan serta dapat dipertanggungjawabkan. Karena dana untuk anggaran pemerintah berasal dari pajak yang merupakan dari rakyat, maka pemerintah memiliki kewajiban untuk melaporkan realisasinya dengan baik. Dengan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) serta mengawasinya dengan baik dan benar maka sedikit banyak akan ikut meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan nantinya.

Daftar Pustaka

Hayadi, N., & Rosini, I. 2020. "Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Kota Administrasi Jakarta Barat." *Jurnal Akuntansi*.

Ikriyati, T., & Aprila, N. 2019. "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah, Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma." *Jurnal Akuntansi* 9(2):131-40. doi: <https://doi.org/10.33369/J.Akuntansi.9.2.131-140>.

Imam Ghozali. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. 9 ed. Semarang: Undip.

Purboraras, Sella Antika. 2018. "Pengaruh Kepatuhan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sia Keuangan Daerah, Pelatihan Dan Pengawasan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada Organisasi Pemerintah Daerah di Kabupaten Blitar)."

Santoso. 2016. *Statistik Deskriptif Untuk Ekonomi*. Elex Media Komputindo.